



## ANALISIS PERAN PERBANKAN DALAM PENYALURAN KREDIT USAHA KECIL TERHADAP PENGEMBANGAN WILAYAH DI KOTA MEDAN

Ikwan Lubis<sup>1</sup>, A M Hatuaon Sihite<sup>2</sup>, Edizal Hatmi<sup>3</sup>, Ilhamsyah<sup>4</sup>

Email : [ikwanlubissem@gmail.com](mailto:ikwanlubissem@gmail.com)<sup>1</sup>, [anggiatsihite282@gmail.com](mailto:anggiatsihite282@gmail.com)<sup>2</sup>, [hatmi1976@gmail.com](mailto:hatmi1976@gmail.com)<sup>3</sup>, [ilhamsyahprof80@gmail.com](mailto:ilhamsyahprof80@gmail.com)<sup>4</sup>

Jl. Sisingamangaraja No.338, Siti Rejo I, Kec. Medan Kota, Kota Medan,  
Sumatera Utara 20219

### ABSTRACT

*The purpose of this study is to find out and analyze the effect of banking and labor loans on small business income and to find out and explain how the role of small businesses in regional development. As a source of data and information for banking policymakers in terms of providing small business loans, especially to support regional development in the city of Medan. The results of this study can be used to formulate wisdom programs and as a basis for making predictions of regional development in the city of Medan. The results of this study can be used as a tool to evaluate economic policies in the banking industry that have been implemented in the city of Medan. The regression equation can be obtained as follows:  $Y = 0.838 + 0.106 X_1 + 0.261 X_2$ , Where:  $Y$  = Total small business income per month  $X_1$  = Amount of banking capital / credit received  $X_2$  = Number of workers. Based on the equation above, it can be concluded, that the significant value between the amount of bank credit received and the total income per month (small business income) of 0.059 shows the result of the correlation of these two variables is significant which means that these two variables have a related relationship. The significant value between the number of workers and the total income per month of 0.000 shows that the correlation between these two variables is significant, which means that these two variables have a related relationship. In the appendix table, we can see that column R shows the correlation coefficient number, which is 0.702. This shows the relationship between the variables is very strong.*

**Keywords:** *The Role of Banking, Lending and Regional Development.*

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kredit perbankan dan tenaga kerja terhadap pendapatan usaha kecil dan untuk mengetahui dan penjelasan bagaimana peranan usaha kecil dalam pengembangan wilayah. Sebagai sumber data dan informasi bagi pembuat kebijakan perbankan dalam hal pemberian kredit usaha kecil khususnya untuk mendukung pengembangan wilayah di kota Medan. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk merumuskan program kebijaksanaan dan sebagai dasar untuk membuat prediksi perkembangan wilayah di kota Medan. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mengevaluasi kebijakan perekonomian di perbankan yang telah dilaksanakan di kota Medan. Persamaan regresi sebagai berikut:  $Y = 0,838 + 0,106 X_1 + 0,261 X_2$ . Dimana :  $Y$  = Total pendapatan usaha kecil per bulan  $X_1$  = Jumlah modal/kredit perbankan yang diterima  $X_2$  = Jumlah tenaga kerja. Berdasarkan persamaan diatas, dapat disimpulkan, bahwa nilai signifikan antara jumlah kredit bank yang diterima dan total pendapatan per bulan (pendapatan usaha kecil) sebesar 0,059 menunjukkan hasil korelasi kedua variabel ini adalah signifikan yang artinya kedua variabel ini memiliki hubungan yang terkait. Nilai signifikan antara jumlah tenaga kerja dan total pendapatan per bulan sebesar 0,000 menunjukkan hasil korelasi kedua variabel ini adalah signifikan, yang artinya kedua variabel ini memiliki hubungan yang terkait. Pada tabel lampiran dapat kita lihat bahwa kolom R menunjukkan angka koefisien korelasi yaitu sebesar 0,702. Hal ini menunjukkan hubungan antara variabel sangat kuat.

**Kata Kunci :** Peran Perbankan, Penyaluran kredit dan Pengembangan Wilaya

### 1. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur baik secara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan dalam suasana kehidupan bangsa yang aman, damai, sejahtera, makmur, merdeka, dan bersahabat. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut maka peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional harus diimbangi dengan upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil. Untuk menghasilkan pembangunan ekonomi yang stabil maka dibutuhkan pembangunan sektor keuangan yang mampu menunjang aktifitas ekonomi rakyat, sehingga hal itu diharapkan dapat meningkatkan kesempatan usaha, pertumbuhan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan tentunya meningkatkan pendapatan daerah. Dalam hal ini program yang paling sesuai dan mengena di lingkungan Indonesia pada umumnya dan di kawasan Medan pada khususnya adalah program usaha kecil. Hal itu dikarenakan Indonesia yang merupakan negara agraris, dan masyarakatnya yang cenderung memiliki ketrampilan dalam bidang tertentu dibandingkan memiliki pendidikan yang tinggi. Oleh sebab itu, masyarakat lebih menyukai adanya usaha kecil dimana dengan modal yang tidak terlalu tinggi maka resiko yang dimilikipun tidak terlalu membahayakan, dan diharapkan keuntunganpun dapat diraih karena mereka memiliki keahlian di bidang usahanya tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka sudah sebaiknya pihak pemerintah mencanangkan program pemberian kredit usaha kecil pada masyarakatnya sehingga diharapkan dapat mengembangkan pembangunan negara. Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia No 3/21/PBI/2001 tentang kewajiban penyediaan modal minimum bank Umum dikatakan bahwa sejalan dengan upaya menggerakkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat BI memandang perlu untuk meningkatkan peran perbankan dalam pembiayaan kegiatan ekonomi terutama terhadap usaha kecil. Kebijakan tersebut dilakukan dengan menurunkan penetapan bobot resiko atas KUK dalam penghitungan aktiva tertimbang menurut resiko untuk kredit yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia, dimana bobot resiko untuk KUK dikenakan sebesar 85% dari modal usaha.

Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam pembangunan keuangan adalah perbankan. Peran strategis perbankan disebabkan oleh fungsi utama lembaga tersebut sebagai suatu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif, efisien, dan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Sebagaimana tertuang pada tujuan di atas, peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat terutama golongan ekonomi lemah dan menambah lapangan kerja adalah bagian dari komitmen hadirnya perbankan dengan salah satu bentuk konkrit usaha pencapaian tujuan ini adalah pemberdayaan usaha kecil. Hal ini menunjukkan bahwa para pengusaha di level bawah, tidak dapat diabaikan begitu saja, melainkan harus dikembangkan semaksimal mungkin. Dalam kaitan ini, dapat dipastikan bahwa pada era global mendatang, semakin besar ekonomi dunia justru semakin kuatlah peran para pemain terkecilnya (*the bigger the world economy, the more powerful its smallest players*). Artinya, dalam era dimana informasi sangat memegang peranan, maka dengan berbekal informasi yang memadai ini tidak dibutuhkan struktur dan manajemen yang besar.

Dengan alasan seperti ini, maka sudah selayaknya apabila para pengusaha kecil dibina, sehingga dapat mengembangkan usahanya. Pengembangan usaha kecil sekaligus diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial maupun kesenjangan ekonomi antara pengusaha lemah dengan pengusaha kuat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka tulisan ini mencoba menganalisa peranan perbankan dalam memacu pengembangan wilayah di kota Medan. Disamping itu, tesis ini juga mencoba menemukan masalah-masalah dan alternatif pemecahannya untuk masa yang akan datang.

Masing-masing bidang pembinaan dalam lingkup UU No. 9 tahun 1995 ini, memiliki tujuan makin berdayanya (modal, daya saing dan sumber daya manusia) pengusaha kecil melalui pencapaian sasaran-sasaran.

UU ini mewajibkan bagi usaha besar dan menengah yang melaksanakan kemitraan dengan usaha kecil untuk memberikan informasi mengenai peluang dan perkembangan pelaksanaan kemitraan, menunjukkan penanggungjawab kemitraan, mentaati dan melaksanakan ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian kemitraan, serta pembinaan terhadap mitranya. Sebaliknya, usaha kecil yang bermitra berkewajiban untuk meningkatkan kemampuan manajemen dan kinerja usaha secara berkelanjutan.

Perlu diketahui bahwa fenomena awal atau sejarah awal terbentuknya perbankan di Indonesia pada umumnya dan di Medan pada khususnya adalah dikarenakan pada masa dulu sebelum tersosialisasinya perbankan, masyarakat cenderung pasif untuk memperbaiki taraf kehidupan ekonominya. Hal itu disebabkan mereka memiliki keterbatasan modal untuk mendirikan suatu usaha kecil-kecilan sekalipun yang mengakibatkan sedikitnya pendapatan yang diperoleh. Oleh sebab itu untuk mendirikan suatu bidang usaha masyarakat cenderung meminta bantuan dana dari pihak non perbankan, seperti lintah darat, rentenir, atau pedagang dan masyarakat kaya sekitar yang suka membungakan uangnya, dan rata-rata memiliki tingkat bunga yang sangat tinggi.

Hal ini mengakibatkan masyarakat jadi enggan untuk berurusan dengan para peminjam modal tersebut, karena tingginya resiko yang diakibatkan bila ternyata mereka nantinya gagal atau bahkan tidak mampu mengembalikan modal awal tersebut. Akibatnya rakyat jadi cenderung pasif, tidak mau bekerja keras, tidak ada motivasi pengembangan diri, dan pendapatannya pun sangat rendah. Hal ini mengakibatkan banyak masyarakat yang pengangguran, berada di bawah garis kemiskinan, sehingga kesejahteraan serta pembangunan pun sulit tercapai.

Berdasarkan pengalaman itulah, maka pemerintah sejak tahun 1983 secara konsisten melakukan upaya restrukturisasi perekonomian. Akan tetapi studi empiris membuktikan bahwa pertambahan keuntungan ternyata tidak dinikmati oleh perusahaan kecil, melainkan justru dinikmati oleh perusahaan skala konglomerat, dengan tenaga kerja lebih dari 1.000 orang, yang menikmati kenaikan nilai tambah secara absolut maupun per rata rata perusahaan (Kuncoro dan Abimanyu, 1995) [1]. Hal itu dikarenakan perusahaan kecil tidak mempunyai modal yang cukup dan masih kurangnya pinjaman modal bagi mereka. Usaha Kecil kurang mendapat perhatian di Indonesia sebelum krisis pecah pada tahun 1997. Namun demikian sejak krisis ekonomi sebagian besar industri kecil tetap bertahan dan meruntuhkan banyak usaha skala besar. Kuatnya daya tahan usaha kecil juga didukung oleh struktur permodalannya yang berasal dari bank swasta (27%), bank pemerintah (34%), dana sendiri (37%), dan supplier (2%) (Azis, 2001). Demikian juga kemampuan menyerap tenaga kerja meningkat dari sekitar 12.000.000 (Tahun 1980), menjadi sekitar 45.000.000 (Tahun

1990), lalu 71.000.000 (Tahun 1993), dan terakhir menjadi sekitar 74.500.000 (Tahun 2001). Sedangkan jumlah industri kecil meningkat dari sekitar 7.000 (Tahun 1980), menjadi sekitar 40.000.000 (Tahun 2001). Hal ini menandakan bahwa usaha kecil sangat memberikan sumbangan yang amat besar terhadap perekonomian daerah. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, permasalahan dalam penelitian ini adalah "Bagaimana pengaruh kredit perbankan dan tenaga kerja terhadap pendapatan usaha kecil dan Bagaimana peranan usaha kecil dalam pengembangan wilayah".

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Kebijakan Pembinaan Pengusaha Kecil

Pada model proses kebijakan Bromley (Naisbitt, John Avon Books : 1993) ini dapat dijelaskan bahwa pada tingkat politis, terdapat lembaga tinggi negara atau badan legislatif yang berwenang mengeluarkan peraturan (kebijakan) dalam skala terluas, misalnya dalam bentuk Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah [2]. Selanjutnya untuk dapat mengimplementasikan UU atau Peraturan tadi, maka pada tingkat organisasional, pemerintah mempunyai agen yang berupa lembaga departemen atau non departemen, sebagai penjabar lebih lanjut dari kebijakan yang lebih tinggi. Artinya, antara tingkat politis dengan tingkat organisasi disini terikat oleh suatu aransemen kelembagaan, yang menjabarkan aturan main bagaimana organisasi-organisasi tadi bekerja atau beroperasi. Aransemen kelembagaan berikutnya terjadi antara tingkat organisasi dengan tingkat operasional yang ditempati oleh individu perorangan, petugas atau pejabat koperasi, pelaku ekonomi kerakyatan, kalangan perbankan, dan sebagainya.

Oleh sebab itu diharapkan dengan adanya kebijakan yang mengatur sistem usaha kecil, maka industri usaha kecil di daerah masing-masing dapat lebih terarah sistem kerjanya dan akhirnya dapat lebih mengefisienkan biaya, tenaga, dan waktu. Hal ini dapat menunjang keefektifan sistem kerja pada usaha kecil tersebut. Kebijakan pembinaan pengusaha kecil itu sebenarnya dilakukan agar suatu daerah dapat mencapai sasaran dari pembinaan usaha kecil. Dimana sasaran dari pembinaan usaha kecil dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 2.1. Sasaran Pembinaan Usaha Kecil**

<b>Produksi</b>	<b>Pemasaran</b>	<b>SDM</b>	<b>Teknologi</b>
1. Meningkatkan kemampuan manajemen & teknik produksi 2. Meningkatkan kemampuan rancang bangun / rekayasa 3. Memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana / prasarana	1. Meningkatkan kemampuan manajemen & teknik pemasaran 2. Melaksanakan penelitian & pengkajian pemasaran 3. Dukungan sarana & promosi / uji coba pasar 4. Pengembangan lembaga pemasaran & jaringan distribusi 5. Memasarkan produk Usaha Kecil	1. Membudayakan kewirausahaan 2. Meningkatkan kemampuan teknis & manajerial 3. Mengembangkan lembaga diklat & konsultasi 4. Menyediakan tenaga penyuluh dan konsultan	1. Meningkatkan kemampuan teknik produksi & pengendalian mutu 2. Meningkatkan kemampuan ciptakan desain baru 3. Insentif bagi Usaha Kecil yang mene-rapkan teknologi baru & berwawasan lingkungan 4. Mempercepat alih teknologi

Sumber : Sidik Prawinegara (1994) [3].

Sementara itu, di Indonesia sendiri terdapat kebijakan yang berkaitan dengan pembinaan usaha kecil dan koperasi. Diantaranya adalah Inpres No. 4 tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan (GNMMK). Adapun produk kebijakan untuk usaha kecil di Indonesia juga terdapat pada pedoman yang dikeluarkan Bank Indonesia mengenai "Kebijakan dan Upaya Perbankan Dalam Membantu Pengembangan Usaha Kecil dan Koperasi" (1997) [4].

### 2.2. Pola Pembinaan Organisasi Usaha Kecil

Menurut Djoko (2006), ada tiga faktor eksternal bank yang diperkirakan akan mempengaruhi pola penyaluran kredit bank di tahun 2006. Ketiga variabel tersebut adalah kondisi suku bunga (*BI rate*) yang masih relatif

tinggi yang saat ini masih sebesar 12,75%, adanya pemberantasan KKN di bank BUMN, dan adanya imbauan pemerintah kepada perbankan untuk membiayai proyek infrastruktur, perkebunan, dan energi [5]. Walaupun dua variabel terakhir lebih banyak ditujukan untuk bank BUMN, namun mengingat porsi penyaluran kredit bank BUMN yang masih sekitar 40% dari seluruh kredit perbankan, maka kedua variabel tersebut tampaknya tidak dapat diabaikan.

Jadi berdasarkan penjelasan diatas, maka ada 3 faktor yang mempengaruhi pola penyaluran kredit bank di Indonesia (Djoko, 2006) [5] yaitu sebagai berikut :

**a. Suku Bunga**

Tingginya suku bunga kredit masih akan menjadi salah satu kendala penyaluran kredit di tahun 2006. Hal ini sesuai dengan hasil Suvey Kredit Perbankan Triwulan I 2006 yang dilakukan Bank Indonesia (BI). Berkaitan dengan masih tingginya suku bunga kredit ini, di masa mendatang penyaluran kredit sepertinya masih akan tetap di dominasi oleh Kredit Modal Kerja dan Kredit Konsumsi. Adapun Kredit Investasi hanya merupakan porsi kecil dalam portofolio kredit bank.. Sampai dengan triwulan I 2006 porsi persetujuan kredit untuk KMK (Kredit Modal Kerja) mencapai 76,2%, Kredit Konsumsi 21,4%, dan Kredit Investasi 2,4%.

Dari sisi sektor ekonomi, penyaluran kredit diperkirakan masih akan fokus pada dua sektor, yaitu Perdagangan, Hotel & Restoran, dan sektor Industri Pengolahan. Dua sektor ini disinyalir memiliki risiko paling rendah dibandingkan dengan sektor lainnya, sehingga masih dapat memberikan daya tarik bagi bank untuk menyalurkan kreditnya.

**b. Pemberantasan KKN**

Akhir-akhir ini cukup banyak proses hukum yang terpaksa menyeret bankir maupun mantan bankir bank BUMN. Terlepas apakah para bankir tersebut akhirnya dinyatakan bersalah atau tidak, namun peristiwa pemanggilan para petinggi bank BUMN ke lembaga hukum dan pengadilan jelas merupakan situasi yang tidak menguntungkan para bankir. Dengan mengikuti proses pengadilan, baik sebagai tersangka atau sekedar sebagai saksi, dapat dipastikan waktu yang tersedia bagi para bankir BUMN untuk melakukan pengembangan bisnis akan semakin berkurang. Jika mereka mesti bersaing dengan para bankir bank swasta yang tidak memiliki beban seperti itu, jelas akan terdapat ruang gerak yang berbeda (*the level of playing field*). Hasil akhirnya, disinyalir beberapa debitor besar bank BUMN berpindah ke bank lain dengan dalih mereka khawatir akan terseret dalam proses pengadilan.

**c. Imbauan Pemerintah**

Beberapa waktu lalu pemerintah telah mengimbau tiga bank BUMN untuk dapat menjadi pelopor pembiayaan beberapa proyek besar. Bank Mandiri diharapkan dapat menjadi pelopor pembiayaan infrastruktur, Bank BNI untuk pembiayaan energi dan listrik, sedangkan BRI untuk pembiayaan perkebunan dan pertanian. Dengan asumsi seluruh proses perijinan dan modal awal ketiga protek tersebut dapat diatasi, proyek besar tersebut tampaknya masih akan menghadapi beberapa kendala. Sebagaimana Survey Persepsi Pasar Triwulan I 2006 yang dilakukan BI, terdapat delapan faktor penghambat pertumbuhan ekonomi 2006 yaitu laju inflasi yang tinggi, tingkat suku bunga dalam negeri, kondisi stimulus fiskal yang masih terbatas, inkonsistensi kebijakan pemerintah, lemahnya penegakan dan kepastian hukum, rendahnya dukungan pemerintah terhadap militer, kerusuhan sosial, dan rendahnya transparansi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Dengan masih besarnya kendala pembiayaan untuk ketiga sektor tersebut, tidak heran jika porsi kredit perbankan untuk sektor tersebut masih rendah, di mana untuk tahun 2005 porsi kredit untuk Konstruksi masih 3,88%, Listrik sebesar 0,77%, dan Pertanian sebesar 5,34%.

Oleh karena itu, untuk menjamin bank-bank akan tertarik untuk memperbesar porsi pembiayaan pada ketiga sektor tersebut diperlukan upaya pemerintah untuk memberikan pemanis agar daya tarik ketiga sektor tersebut lebih kuat. Rendahnya pembiayaan perbankan pada ketiga sektor tersebut jelas akibat kurang adanya daya tarik dan terlalu besarnya risiko yang harus dihadapi bank.

Menurut Rahayu (2005), permasalahan modal yang diberikan untuk kredit usaha kecil timbul karena tidak adanya titik temu UKM sebagai debitor dan pihak kreditor [6]. Disisi debitor, karakteristik dari sebagian besar UKM di Indonesia antara lain adalah masih belum menjalankan bisnisnya dengan prinsip-prinsip manajemen modern, tidak/belum memiliki badan usaha resmi, serta keterbatasan aset yang dimiliki. Sementara itu, disisi kreditor, pemodal atau lembaga pembiayaan untuk melindungi resiko kredit, menuntut adanya kegiatan bisnis yang dijalankan dengan prinsip-prinsip manajemen modern, ijin usaha resmi serta adanya jaminan (*collateral*).

Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat diketahui bahwa perbankan sebenarnya tidak berkeinginan untuk mempersulit nasabah dalam hal pemberian kredit, akan tetapi bank hanya ingin lebih cermat lagi dalam hal pemberian kredit usaha kepada masyarakat agar keadaan masa lampau pada masa krisis moneter yang mengakibatkan banyaknya perbankan yang tutup karena terjadinya kasus kredit macet yang tidak terselesaikan.

### 2.3. Usaha Kecil

Nitisastro dalam Tjiptoherijanto (1997:135) mengutarakan bahwa system perekonomian yang ideal bagi Indonesia adalah: “ Sistem perekonomian yang berdasarkan pada usaha bersama dari masyarakat secara keseluruhan dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat (dengan meningkatkan pendapatan perkapita) dan pembagian yang seimbang dari hasil yang berasal dari usaha bersama tersebut (pembagian pendapatan merata), dengan negara memainkan peran aktif untuk mengarahkan dan melaksanakan pembangunan ekonomi [7].”

Thoma (1990) menyatakan bahwa industri kecil merupakan sebagian usaha masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidupnya melalui kegiatan produksinya yang berskala kecil dan dalam kegiatannya memanfaatkan semua sumber daya dan factor-faktor produksi yang tersendiri dengan modal kecil serta menggunakan teknologi yang sederhana.

### 2.4. Pendapatan Masyarakat

Seluruh masyarakat selalu membutuhkan sejumlah pendapatan yang digunakan memenuhi kebutuhan keluarga. Pendapatan ini diperoleh dari berbagai unsur antara lain : dari hasil pertanian, hasil industri, gaji/upah dan lain-lain. Maryatmo dan Susilo (1996) menyatakan bahwa pendapatan merupakan jumlah seluruh uang yang diterima oleh keluarga atau seseorang selama jangka waktu tertentu biasanya satu tahun [8]. Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan masyarakat adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima oleh masyarakat pada satu tahun tertentu, baik itu dari hasil produksi pertanian maupun dari hasil produksi industri dan perdagangan serta sektor lainnya.

### 2.5. Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah merupakan suatu tindakan mengembangkan wilayah atau membangun daerah atau kawasan dalam rangka usaha memperbaiki tingkat kesejahteraan hidup masyarakat (Radjisarosa, 1981 : 85). Sedangkan menurut Sudarto (1989 : 64) mengemukakan pengembangan wilayah adalah memajukan atau memperbaiki serta meningkatkan sesuatu yang sudah ada. Pengembangan suatu wilayah paling sedikit mempunyai dua makna. Pertama, wilayah yang objektif yang oleh para perencana dibagi habis kedalam beberapa wilayah pembangunan. Kedua, wilayah subjektif yaitu perwilayahan merupakan suatu cara untuk mengenal masalah. Hal ini diartikan sebagai usaha untuk melakukan klasifikasi. Selanjutnya wilayah subjektif dibagi dua jenis , yaitu:

- a. Wilayah homogen yaitu : wilayah yang mempunyai karakteristik yang sama secara fisik dan sosial ekonomi
- b. Wilayah fungsional yaitu : wilayah yang didasarkan atas adanya hubungan fungsional antara unsur unsur tertentu yang terdapat dalam wilayah tersebut.

Sukirno (1992 :43) membedakan wilayah atas 3 bagian [9], yaitu :

- a. Wilayah homogen : wilayah dimana kegiatan berlaku di setiap pelosok ruang mempunyai sifat yang sama ditinjau dari segi pendapatan perkapita penduduk dan dari struktur ekonomi.
- b. Wilayah modal : wilayah sebagai ruang ekonomi dikuasai oleh beberapa pusat kegiatan ekonomi
- c. Wilayah administrasi : wilayah yang didasarkan atas pembagian administrasi pemerintah.

Menurut Kadariah (1985) terdapat beberapa konsepsi tentang pengembangan wilayah, namun para pakar ekonomi regional sependapat bahwa tujuan pengembangan regional tersebut merupakan bagian dari tujuan pembangunan nasional yang pada dasarnya berisikan [10], yaitu:

- a. Mencapai pertambahan pendapatan perkapita yang cepat.
- b. Menyediakan kesempatan kerja yang cukup.
- c. Mengubah struktur perekonomian supaya tidak berat sebelah.

Selanjutnya menurut Anwar (1991), ditegaskan bahwa tujuan pengembangan wilayah tersebut hanya akan tercapai apabila komponen yang menyangkut kegiatan atau pemanfaatan sumber daya wilayah, penataan ruang, perubahan sosial, dan pertumbuhan ekonomi yang aktif, dinamis, tumbuh dan berkembang. Menurut Todaro dan Smith (2003), untuk menilai keberhasilan pembagian ekonomi suatu negara didasarkan pada tiga nilai pokok [11], yaitu:

1. Berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (sustenance) Pengurangan tingkat kemiskinan
2. Meningkatkan rasa harga diri (selfesteem) masyarakat sebagai manusia
3. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memilih (freedom from servitude) yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia

Keempat kriteria ini harus berjalan secara bersama sama sehingga didalam proses pengembangan tersebut terlihat adanya :

1. Perubahan struktural masyarakat
2. Keuntungan untuk seluruh masyarakat dengan adanya distribusi pendapatan
3. Pertumbuhan ekonomi yang cepat
4. Efisiensi

Sementara menurut Hanafiah (1982), beberapa indikator yang dapat dipakai dalam mengidentifikasi perkembangan satu wilayah antara lain [12], yaitu :

1. Jumlah penduduk
2. Pasar tradisional
3. Jumlah perusahaan kecil, warung dan usaha kecil lainnya
4. Persepsi penduduk dan peran sertanya
5. Tingkat kesejahteraan
6. Jumlah relatif pengusaha seperti pedagang, penjaga toko, dan lain-lain.
7. Jumlah relatif sarana dan prasarana transportasi.

Indikator tersebut dapat dilihat secara bersama sama ataupun salah satunya saja. Selain itu pengembangan wilayah dari 3 sisi yakni :

1. Dari sisi administratif (misalnya pemekaran kota Medan dari 17 kecamatan menjadi 21 kecamatan).
2. Dari sisi fisik yakni luas areal.
3. Dari sisi sosial ekonomi (misalnya penambahan tenaga kerja yang mengakibatkan naiknya pendapatan riil).

## **2.6. Peranan Perbankan Terhadap Pengembangan Wilayah**

Menurut Kiryanto (2007), pembangunan ekonomi di suatu wilayah sangat bergantung kepada perkembangan dinamis dan kontribusi nyata dari sektor perbankan. Pasca krisis ekonomi dan moneter 1997 dan 1998 di Indonesia memberikan gambaran nyata betapa peran strategis sektor perbankan tak terbantahkan. Ketika sektor perbankan terpuruk, perekonomian nasional juga ikut terpuruk, demikian juga sebaliknya. Perbankan Indonesia pasca krisis kembali memberikan andil nyata dalam pemulihan ekonomi, walaupun belum mampu kembali ke masa sebelum krisis. Dengan dukungan teknologi informasi peran perbankan semakin meluas bukan hanya dalam hal pemberian KUK, tapi juga berkembang ke beragam produk dan layanan jasa keuangan.

Sejak masa krisis hingga kini, terjadi perubahan di kancah perbankan Indonesia, dimana sebagian bank melakukan pembiayaan ke sektor usaha kecil. Hal itu didorong berdasarkan fakta bahwa ternyata sektor usaha kecil memiliki daya tahan lebih baik dalam menghadapi gejolak ekonomi dan lebih fleksibel dalam menyikapi tiap perubahan lingkungan bisnis.

Fakta itu dibuktikan dengan semakin banyaknya bank masuk ke sektor perbankan ritel dimana sektor usaha kecil menjadi tulang punggungnya. Jadi dapat dikatakan bahwa peranan perbankan dalam pemberian KUK bukan saja mampu menghadapi krisis ekonomi yang berkepanjangan, melainkan juga mampu memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam :

- a. Penyerapan tenaga kerja yang sangat besar
- b. Sebagai jaring pengaman sosial , khususnya dalam penyediaan lapangan kerja bagi calon calon pekerja maupun pekerja yang terkena PHK
- c. Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kepada perekonomian rakyat
- d. Memperkuat fundamental ekonomi.

Yang juga perlu dicermati, bukti bahwa perbankan dalam pemberian KUK dapat mengakibatkan perkembangan wilayah terutama dalam bidang ekonomi, bahwa sector kredit usaha kecil tersebut memiliki karakteristik yang unik yaitu :

- a. Dapat dikembangkan di hampir semua sektor usaha di Indonesia.
- b. Pemerataan kesempatan kerja.
- c. Umumnya sangat fleksibel, karena skala usaha dan teknologinya relatif kecil dan sederhana sehingga mudah menyesuaikan terhadap tiap perubahan.
- d. Produk yang dihasilkan sebagian besar merupakan kebutuhan primer masyarakat.
- e. Lebih sesuai dengan kehidupan tingkat bawah, sehingga upaya mengentaskan masyarakat dari keterbelakangan pendapatan akan lebih efektif.

Dari sisi lembaga pembiayaan (dalam hal ini termasuk perbankan) juga dapat dikatakan bahwa tujuan dari pemberian kredit usaha kecil ini adalah :

- a. Meningkatkan aktivitas pengusaha kecil dalam pembiayaan pengembangan usaha melalui modal kerja dan investasi.
- b. Mengurangi resiko kredit.

- c. Membantu program pemerintah dalam penguatan Jaring Pengaman Sosial dan Ketahanan Nasional.

Jadi dapat dikatakan bahwa peranan perbankan dalam pemberian Kredit Usaha kecil itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan suatu wilayah, khususnya dalam bidang ekonomi.

Hal itu dapat dilihat bahwa pasca krisis ekonomi, dimana pada saat itu bank mulai memberikan bantuan kredit untuk para pengusaha kecil, sehingga masyarakat dengan modal terbatas memperoleh bantuan dana untuk dapat membangun suatu usaha yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup mereka.

Oleh karena itu, mulai banyak masyarakat yang membangun usaha kecil sendiri, karena sudah mendapat modal pinjaman dari bank, dan hal ini secara tidak langsung mendatangkan keuntungan bagi masyarakat sekitar, karena untuk mendirikan suatu usaha juga dibutuhkan tenaga kerja. Maka para pengusaha kecil itu pun merekrut karyawan di perusahaan mereka. Hal ini mengakibatkan berkurangnya tingkat pengangguran di Indonesia, dan meningkatnya stabilitas perekonomian di suatu wilayah tersebut. Hal itu dikarenakan para tenaga kerja yang bekerja di perusahaan kecil tersebut tentunya akan digaji sesuai dengan tingkatan kerjanya masing-masing, hal ini mengakibatkan berkurangnya tingkat kemiskinan di suatu daerah, karena masyarakatnya mendapat gaji sendiri.

Usaha kecil ini bersifat sederhana, oleh sebab itu tenaga kerja yang diperkerjakan pun tidak harus berpendidikan tinggi, cukup dengan dilatih dan memiliki keterampilan khusus maka ia akan diterima bekerja. Hal ini mengakibatkan masyarakat golongan bawah pun bisa bekerja disana, sehingga dapat mengakibatkan berkurangnya tingkat kesenjangan sosial antara masyarakat golongan atas dan golongan bawah.

Jadi, dapat dikatakan bahwa peranan perbankan terhadap perkembangan wilayah cukup besar, yakni :

- a. Mengurangi tingkat pengangguran.
- b. Meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan daerah.
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- d. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dari masyarakat golongan bawah karena mereka dilatih keterampilan tertentu yang berhubungan dengan bidang usaha kecil tersebut.
- e. Mengurangi kesenjangan sosial.
- f. Meningkatkan keamanan akibat tingkat kesenjangan sosial berkurang sehingga tingkat kriminalitas menurun.
- g. Dengan adanya bank yang memberikan kredit usaha kecil, maka hal ini dapat meningkatkan devisa negara. Dimana jika produk-produk yang dihasilkan dari usaha kecil itu berkualitas dan banyak peminatnya maka akan dapat diekspor ke luar negeri sehingga pendapatan negara bertambah dan Indonesia dapat diperhitungkan di dunia internasional.

Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa perbankan memiliki andil yang cukup besar terhadap perkembangan wilayah, akan tetapi tetap dibutuhkan kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak yang terkait sehingga proses pemberian kredit dapat lebih lancar terlaksana.

## 2.7. Penelitian Sebelumnya

Samosir (2000), pada penelitian yang berjudul “Peranan Kredit Usaha Kecil Terhadap Perkembangan Wilayah Di Medan Denai”, berpendapat bahwa dalam mendirikan suatu usaha kecil kebanyakan masyarakat masih menggunakan modal yang berasal dari milik sendiri (67 %), dan sisanya yakni sebanyak 33 % berasal dari perbankan. Dia juga mengatakan bahwa Kredit Usaha Kecil memberi pengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja. Sedangkan faktor yang mempengaruhi keberhasilan Kredit Usaha Kecil adalah modal kerja, variabel tenaga kerja yang baik, dan variabel investasi barang modal. Jumiadi A.W.(1999), dalam penelitiannya yang berjudul “Peranan Industri Kecil Dalam Meningkatkan Pendapatan Dan Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Langkat”, menghasilkan suatu kesimpulan dari penelitiannya, dimana dia mengatakan bahwa industri kecil telah menyerap banyak tenaga kerja sehingga tingkat pengangguran di kota Medan dapat dikurangi [13]. Tingkat pengangguran yang berkurang itu dapat kita lihat sejak tahun 2005, dimana jumlah tenaga kerja pada saat itu yang berjumlah 32.850.000 orang, mengalami peningkatan pada tahun 2006 menjadi sejumlah 37.926.000 orang, dan hal ini dikarenakan jumlah industri kecil yang juga mengalami peningkatan pesat.

## 2.8. Kerangka Pemikiran

Pengaruh atau hubungan perbankan terhadap peningkatan pendapatan usaha kecil dan pengaruhnya terhadap pengembangan wilayah dapat dilihat dari berapa besar jumlah bantuan modal yang diberikan oleh bank terhadap usaha kecil. Pada perkembangan selanjutnya, pemberian modal oleh bank akan digunakan untuk mendirikan suatu usaha kecil, yang mengakibatkan peningkatan pendapatan dari karyawan dan juga daerahnya, lalu akibatnya usaha tersebut akan memperoleh laba dan otomatis hal ini dapat meningkatkan



kebutuhan tenaga kerja, sehingga tingkat pengangguran pun berkurang, dan hal ini mengakibatkan terciptanya perkembangan suatu wilayah.

Proses itu dapat digambarkan dengan kerangka berfikir pada skema berikut :

**Gambar 2.1 : Kerangka Penilaian Pengaruh Perbankan Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Kecil dan Terhadap Pengembangan Wilayah Tersebut.**



### 2.9. Hipotesis Penelitian

1. Kredit perbankan dan tenaga kerja berpengaruh terhadap pendapatan usaha kecil.
2. Usaha Kecil berdampak positif terhadap pengembangan wilayah di kota Medan.

## 3. METODOLOGI PENELITIAN

### 3.1. Penentuan Lokasi

Penelitian dilakukan di kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Kota Medan terdiri dari 21 Kecamatan, dengan luas wilayah 265,10 Km<sup>2</sup>. Penelitian dilakukan di Kota Medan dengan alasan bahwa Kota Medan sebagai Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara merupakan wilayah berkembangnya industri kecil.

### 3.2. Jenis Dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu :

Data primer : yaitu data yang dikumpulkan melalui wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner).

Data sekunder : yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka, dokumen dari lembaga/instansi terkait dan hasil karya ilmiah para ahli.

### 3.3. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah industri kecil yang terdaftar dalam data dari BPS, yang ditunjukkan pada table berikut :

**Tabel 3.1. Jumlah Usaha Kecil di Kota Medan Berdasarkan Kecamatan**

No	Kecamatan	Jumlah Usaha Kecil	Persentase
1	Medan Tuntungan	809	6,84 %
2	Medan Johor	880	7,44 %
3	Medan Amplas	40	0,33 %
4	Medan Denai	768	6,50 %
5	Medan Area	990	8,37 %
6	Medan Kota	1401	11,85 %
7	Medan Maimun	670	5,67 %
8	Medan Polonia	105	0,88 %
9	Medan Baru	345	2,92 %
10	Medan Selayang	870	7,36 %
11	Medan Sunggal	43	0,36 %
12	Medan Helvetia	98	0,82 %
13	Medan Petisah	498	4,21 %
14	Medan Barat	370	3,13 %

15	Medan Timur	590	4,99 %
16	Medan Perjuangan	543	4,59 %
17	Medan Tembung	790	6,68 %
18	Medan Deli	879	7,44 %
19	Medan Labuhan	354	2,99 %
20	Medan Marelan	238	2,01 %
21	Medan Belawan	533	4,51 %
<b>Jumlah</b>		<b>11.814</b>	<b>99,89 = 100</b>

Sumber: Medan Dalam Angka , BPS, 2007

Berdasarkan tabel diatas, metode penarikan sampel dilakukan secara bertahap, dimana peneliti memilih secara sengaja (*stratified sampling*) daerah potensial yang menghasilkan produk industri kecil dan yang paling tidak potensial untuk menghasilkan produk industri kecil. Berdasarkan hal itu, maka untuk pemilihan lokasi dilakukan dengan cara 10 % dari 21 kecamatan di kota Medan, maka diperoleh 2 kecamatan saja. Jadi berdasarkan data tabel diatas, maka diperoleh 2 kecamatan, yakni Kecamatan Medan Kota sebagai daerah paling potensial, dan Kecamatan Medan Amplas sebagai daerah yang paling tidak potensial.

Dalam penelitian ini, dari masing-masing kecamatan yaitu Kecamatan Medan Kota dan Kecamatan Medan Amplas akan dipilih sebanyak 15 usaha kecil yang dianggap sudah cukup mewakili dari keseluruhan usaha kecil yang terdapat di daerah tersebut, dimana dari masing masing usaha kecil akan di wawancarai sebanyak 2 sampai 4 orang, baik dari karyawan maupun dari pemiliknya.

### 3.4. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan untuk membuktikan adanya hubungan antara suatu variabel dengan variabel lainnya adalah dengan menggunakan analisis korelasi. Untuk menjawab hipotesis yang akan dibuktikan dalam penelitian ini, maka :

1. Untuk menjawab hipotesis pertama yakni, mengidentifikasi pengaruh kredit perbankan terhadap pendapatan usaha kecil dapat dianalisa dengan menggunakan Regresi Linier Berganda dengan persamaan berikut :

$$Y = b_0 + b_1.X_1 + b_2.X_2 + b_3.X_3 + \mu..$$

Dimana :

- Y = Pendapatan Usaha Kecil (Rupiah)
- X<sub>1</sub> = Kredit yang Disalurkan / Diterima Bank (Rupiah)
- X<sub>2</sub> = Jumlah Tenaga Kerja Usaha Kecil ( orang)
- b<sub>0</sub> = Konstanta
- b<sub>1</sub>-b<sub>2</sub> = Koefisien Regresi

2. Untuk menjawab hipotesis kedua yaitu bahwa usaha kecil berdampak positif terhadap perkembangan wilayah di Kota Medan, dapat dijabarkan secara deskriptif.

### 3.5. Definisi Variabel Operasional Penelitian

Untuk mendapatkan persamaan persepsi terhadap perubahan variabel yang ada dalam penelitian ini, maka diperlukan penegasan terhadap batasan operasional yang dianggap penting dan merupakan definisi konsep dari penelitian ini, antara lain :

1. Pendapatan usaha kecil adalah merupakan jumlah penerimaan bersih selama satu tahun produksi diukur berdasarkan jumlah rupiah. Dimana hasil penjualan tahunan paling banyak adalah sebesar Rp.1.000.000.000 dan dengan kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Kredit Perbankan adalah kredit yang diberikan berupa modal pinjaman yang diberikan oleh pihak bank pada masyarakat atau nasabahnya yang butuh modal untuk membuka suatu usaha kecil dan nasabah tersebut sudah harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dari pihak bank, dan bersedia untuk membayarkan utangnya pada jangka waktu tertentu beserta dengan bunganya.
3. Tenaga Kerja adalah : orang yang bekerja di suatu perusahaan tertentu dimana ia berperan sebagai objek maupun subjek dari pembangunan perusahaan. Berperan sebagai objek maksudnya bahwa tenaga kerja merupakan sasaran pembangunan untuk disejahterakan, dan sebagai subjek bahwa tenaga kerja disini berperan sebagai pelaku pembangunan dari perusahaan itu sendiri dan nantinya akan memperoleh gaji atau upah atas hasil kerja setiap bulannya.

4. Pengembangan Wilayah adalah : merupakan suatu tindakan mengembangkan atau membangun kawasan tertentu dalam rangka usaha memperbaiki tingkat kesejahteraan hidup masyarakat, dimana untuk mencapai suatu pengembangan wilayah tidak terlepas dari beberapa pilar berikut :
  - a. Sumber Daya Alam : merupakan semua aspek alam yang dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar (tanpa bantuan dari manusia ), dan semakin lama dapat berkurang dan habis apabila tidak dilakukan upaya pelestarian sejak awal.
  - b. Sumber Daya Manusia : merupakan pilar yang cukup penting karena dengan kemampuan yang ada akan mampu menggerakkan seluruh sumber daya yang ada. Disamping itu, SDM punya peran ganda dalam sebuah proses pembangunan, yakni sebagai objek pembangunan karena merupakan sasaran pembangunan untuk disejahterakan, dan juga sebagai subjek pembangunan karena berperan sebagai pelaku pembangunan.
  - c. Teknologi : merupakan hasil buah pikir dari suatu pengetahuan, dimana seseorang memiliki pengetahuan, lalu pengetahuan tersebut berkembang menjadi suatu pengetahuan ilmiah dan nantinya berkembang menjadi suatu ilmu yang dipelajari terus menerus kemudian akhirnya menciptakan suatu hasil akhir yaitu teknologi yang menggambarkan cara penyelesaian suatu masalah dengan lebih mudah dan lebih meminimalkan waktu dan tenaga.
  - d. Kebijakan Publik : adalah merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan tertentu dalam hal ini untuk terciptanya pengembangan suatu wilayah demi kepentingan masyarakat.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 4.1. Perkembangan Perbankan Di Kota Medan

Kota Medan merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia. Faktor-faktor penyebabnya antara lain karena luasnya daerah, banyak penduduknya, tingkat teknologi yang dimiliki, jumlah masyarakatnya yang banyak, tingkat keuangan suatu daerah, dan masih banyak faktor penyebab lainnya.

Salah satu faktor penting untuk menilai kota itu dianggap besar adalah dari tingkat perkembangan wilayahnya, dalam hal ini akan dibahas mengenai tingkat perkembangan keuangannya, yang diukur dari peningkatan jumlah pendapatan daerah, berkurangnya tingkat pengangguran, dan banyaknya lowongan pekerjaan yang berada di suatu daerah tersebut berdasarkan jumlah perusahaan yang tercipta di daerah tersebut.

Berdasarkan uraian diatas maka salah satu faktor penting untuk peningkatan jumlah perusahaan di kota Medan adalah dengan mendirikan usaha kecil. Dimana dalam mendirikan tidak membutuhkan biaya atau modal yang terlalu besar sehingga usaha ini menjadi usaha yang digemari oleh masyarakat pada umumnya.

Kita ketahui bahwa dalam mendirikan suatu usaha kecil dibutuhkan modal yang cukup. Oleh sebab itu bagi mereka yang tidak sanggup membiayai sendiri akan dipinjamkan oleh bank dengan syarat yang telah ditetapkan sebelumnya tentunya.

Mengajukan permohonan kredit ke bank tidaklah sulit, syaratnya adalah mendapatkan formulir, mengisinya, melengkapi syaratnya, kemudian mengirimkannya ke bank. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa terkadang calon debitur gagal untuk mendapat kredit dari bank, karena dianggap tidak cukup layak untuk mendapatkan kredit.

Dapat dikatakan perkembangan perbankan di kota Medan cukup baik dimana kita lihat sekarang semakin banyak cabang-cabang bank baru yang dibuka hampir di tiap wilayah Kota Medan. Mulai dari bank yang besar sampai dengan bank yang khusus menangani untuk kredit mikro. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh data bahwa dari 30 usaha kecil yang diwawancarai ada sebanyak 20 ( 66,7%) usaha kecil yang memperoleh modalnya dari bank dan sisanya yakni 10 (33,3 %) usaha kecil modalnya berasal dari modal pribadi.

Selain itu, dari data juga diperoleh peningkatan jumlah simpanan masyarakat di bank, baik dalam bentuk tabungan biasa, giro, deposito, maupun pinjaman yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.1. Posisi Dana Simpanan Rupiah dan Valuta Asing Menurut Kelompok Bank Di Medan**

Kelompok Bank	Jumlah Dana (Juta Rupiah)
Bank Pemerintah	25.660.607
Bank Swasta Nasional	29.891.720
Bank Asing dan Campuran	4.532.308
Bank Perkreditan Rakyat	286.742

Sumber : Medan Dalam Angka, 2007

#### 4.2. Perkembangan Kredit Usaha Kecil Di Kota Medan

Setiap usaha berasal dari sebuah gagasan, demikian pula dengan usaha dalam mendirikan perusahaan kecil. Akan tetapi selama hampir 20 tahun telah terjadi perubahan peraturan yang banyak dihasilkan untuk mengatur kehidupan usaha kecil.

Di Indonesia jumlah usaha kecil sangat mengesankan, dimana jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam usaha kecil tersebut bisa mencapai lebih dari 70 juta orang atau 88,4 % dari total tenaga kerja yang terlibat di suatu usaha.

Selain itu tidak dapat dipungkiri bahwa usaha kecil telah mampu memberikan lapangan pekerjaan bagi 7,4 juta orang, dimana kita ketahui bahwa peningkatan dan perkembangan usaha kecil juga mengalami peningkatan yang signifikan. Adapun peningkatan jumlah usaha kecil juga dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.2. Posisi Kredit Perbankan Rupiah dan Valuta Asing menurut Kelompok Bank**

Kelompok Bank	Jumlah (Juta Rupiah)
Bank Pemerintah	21.503.422
Bank Swasta Nasional	16.802.327
Bank Asing Dan Campuran	3.519.213
Bank Perkreditan Rakyat	294.775

Sumber : Medan dalam Angka, 2007

#### 4.3. Perkembangan Wilayah Di Kota Medan

Mengingat wilayah Kota Medan yang amat sangat luas, tentunya untuk menciptakan suatu perkembangan wilayah dibutuhkan suatu sistem pembangunan yang baik dan terarah. Tingkat pembangunan itu tidak mungkin dilakukan secara serentak seluruhnya. Oleh karena itu harus diprioritaskan kepada kawasan tertentu yang memenuhi kriteria, dalam hal ini yang kita lihat adalah di daerah Medan Kota, dimana pada daerah ini paling sering terjadinya aktivitas masyarakat, jadi dapat juga dikatakan bahwa daerah ini adalah pusat aktivitas dan kegiatan masyarakat.

Kawasan andalan seperti didefenisikan diatas adalah kawasan dalam kawasan budi daya yang memiliki potensi tertentu, baik yang sudah berkembang maupun yang prospektif untuk dikembangkan. Kawasan ini strategis bagi pembangunan serta pengembangan wilayah nasional.

Salah satu faktor penentu tingkat perkembangan suatu wilayah adalah berdasarkan tingkat perekonomiannya, dalam hal ini membahas berdasarkan jumlah pendapatan masyarakatnya. Kita dapat melihat bahwa pendapatan masyarakat itu diperoleh bila dia memiliki mata pencaharian, salah satu mata pencaharian mereka adalah dengan bekerja sebagai karyawan di suatu perusahaan, dalam hal ini kita membahas dalam suatu usaha kecil saja. Oleh sebab itu diperoleh data mengenai laju pertumbuhan ekonomi di Medan menurut lapangan usaha sejak thn 2005-2007 sebagai berikut :

**Tabel 4.3. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Medan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2005-2007**

Lapangan Usaha	2005 (%)	2006 (%)	2007 (%)
Pertanian	3,38	2,32	3,57
Pertambangan	6,42	4,17	5,15
Industri Pengolahan	4,76	5,47	6,21
Listrik, Gas dan Air Minum	5,15	3,08	4,25
Konstruksi	12,96	10,33	11,98
Perdagangan, Hotel dan Restoran	4,95	6,95	7,82
Pengangkutan	10,11	11,91	12,90
Keuangan, Real Estate	7,15	9,87	11,24
Jasa Jasa	4,36	7,09	9,45

Sumber : Medan Dalam Angka, 2007

#### 4.4. Analisis Pengaruh Kredit Perbankan dan Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan Usaha

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa responden terbagi dalam beberapa kelompok usia. Responden yang berusia 21-25 tahun sebanyak 4 orang (13,3%), berusia 26-30 tahun sebanyak 6 orang (20,0%), berusia 31-35 tahun sebanyak 7 orang (23,3%), berusia 36-40 tahun sebanyak 8 orang (26,7%) dan berusia 41-45 tahun sebanyak 5 orang (16,7%). Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.4. dibawah ini :

**Tabel 4.4. Distribusi Responden Menurut Usia**

No	Usia	Frekuensi	Persentase
1	21-25 Tahun	4	13,3
2	26-30 Tahun	6	20,0
3	31-35 Tahun	7	23,3
4	36-40 Tahun	8	26,7
5	41-45 Tahun	5	16,7
<b>Jumlah</b>		<b>30</b>	<b>100</b>

Sumber : Formulir Isian Data, 2008

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa mayoritas responden adalah laki-laki, yaitu sebanyak 18 orang atau sekitar 60,0%. Selebihnya adalah perempuan sebanyak 12 orang atau sekitar 40,0%. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.5. dibawah ini :

**Tabel 4.5. Distribusi Responden Menurut Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-laki	18	60,0
2	Perempuan	12	40,0
<b>Jumlah</b>		<b>30</b>	<b>100</b>

Sumber : Formulir Isian Data, 2008

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa responden memeluk agama yang berbeda. Sebanyak 15 orang atau sekitar (50,0 %) responden beragama Islam, 7 orang atau sekitar (23,3 %) responden beragama Kristen, 4 orang atau sekitar (13,3 %) responden beragama Katolik dan 4 orang atau sekitar (13,3 %) responden beragama Budha. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.6. dibawah ini :

**Tabel 4.6. Distribusi Responden Menurut Agama**

No	Agama	Frekuensi	Persentase
1	Islam	15	50,0
2	Kristen	7	23,3
3	Katolik	4	13,3
4	Budha	4	13,3
<b>Jumlah</b>		<b>30</b>	<b>100</b>

Sumber : Formulir Isian Data, 2008

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa responden memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda. Sebanyak 1 orang atau sekitar (3,3 %) responden berpendidikan SD, 4 orang atau sekitar (13,3 %) responden berpendidikan SLTP, 15 orang atau sekitar (50,0 %) responden berpendidikan SLTA, 6 orang atau sekitar (20,0 %) responden berpendidikan SMK dan 4 orang atau sekitar (13,3 %) responden berpendidikan Perguruan Tinggi. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.7. dibawah ini :

**Tabel 4.7. Distribusi Responden Menurut Pendidikan Terakhir**

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Persentase
1	SD	1	3,3
2	SLTP	4	13,3
3	SLTA	15	50,0
4	SMK	6	20,0
5	Perguruan Tinggi	4	13,3
<b>Jumlah</b>		<b>30</b>	<b>100</b>

Sumber : Formulir Isian Data, 2008

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa status responden dalam usaha kecil yaitu sebagai pemilik 16 orang atau sekitar 53,3 % dan 14 orang atau sekitar 46,7 % sebagai karyawan. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.8. dibawah ini :

**Tabel 4.8. Distribusi Responden Menurut Status Dalam Usaha Kecil**

No	Status Dalam Usaha Kecil	Frekuensi	Persentase
1	Pemilik	16	53,3
2	Karyawan	14	46,7
<b>Jumlah</b>		<b>30</b>	<b>100</b>

Sumber : Formulir Isian Data, 2008

Untuk mengidentifikasi dan mengetahui bahwa kredit perbankan dan tenaga kerja memiliki pengaruh terhadap pendapatan usaha kecil di Kota Medan dilakukan melalui pendekatan analisa regresi linier berganda.

Dalam hal ini jenis industri yang dianalisis adalah industri pangan, industri sandang dan kulit, industri logam dan jasa, industri kimia dan bahan bangunan, dan industri aneka.

Adapun peubah yang dibahas dalam analisis ini adalah :

1. Total pendapatan usaha kecil per bulan (Y).
2. Jumlah modal / kredit perbankan yang diterima ( $X_1$ ).
3. Jumlah tenaga kerja ( $X_2$ ).

**Hasil Pengujian :**

Berdasarkan model persamaan regresi berganda, maka dilakukan perhitungan memakai komputer Statistical Package for Social Studies (SPSS/PC) For Windows dengan hasil printoutnya secara lengkap dapat dilihat dalam lampiran.

Dari hasil print out tersebut dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 0,838 + 0,106 X_1 + 0,261 X_2$$

Dimana :

- Y = Total pendapatan usaha kecil per bulan
- $X_1$  = Jumlah modal/kredit perbankan yang diterima
- $X_2$  = Jumlah tenaga kerja

Berdasarkan persamaan diatas, dapat disimpulkan, bahwa nilai signifikan antara jumlah kredit bank yang diterima dan total pendapatan per bulan (pendapatan usaha kecil) sebesar 0,059 menunjukkan hasil korelasi kedua variabel ini adalah signifikan yang artinya kedua variabel ini memiliki hubungan yang terkait.

Nilai signifikan antara jumlah tenaga kerja dan total pendapatan per bulan sebesar 0,000 menunjukkan hasil korelasi kedua variabel ini adalah signifikan, yang artinya kedua variabel ini memiliki hubungan yang terkait. Pada tabel lampiran dapat kita lihat bahwa kolom R menunjukkan angka koefisien korelasi yaitu sebesar 0,702. Hal ini menunjukkan hubungan antara variabel sangat kuat. Dari tabel yang terdapat pada lampiran, nilai F = 13,080.

Jika Derajat keyakinan = 95 % ,

Taraf nyata = 5 % ,

Derajat kebebasan dari  $df = 1$  dan  $df = 28$

maka F tabel = 4.200 ; dimana hal ini menandakan bahwa semua variabel punya nilai signifikan dan mempengaruhi terhadap variabel terkait.

Lalu ;

Jika tingkat kepercayaan taraf nyata = 5 %

Derajat kebebasan =  $N - 2 = 30 - 2 = 28$

t tabel = 1.700

a. t hitung  $X_1 = 1.788 > t$  tabel = 1.700

b. t hitung  $X_2 = 4.652 > t$  tabel = 1.700

**4.5 . Analisis Dampak Positif Usaha Kecil Terhadap Pengembangan Wilayah Di Kota Medan.**

Keberhasilan suatu usaha kecil tidak dapat dipungkiri sangat dipengaruhi oleh banyak hal, seperti struktur permodalan yang cukup, sumber modal yang jelas dan akurat, sumber bahan baku yang berkualitas, sifat produksi dan cara produksi yang efektif, nilai tambah dari produk yang dihasilkan, dan pemasaran yang cukup merata ke semua pihak. Oleh sebab itu dilakukan analisis dampak positif usaha kecil terhadap pengembangan wilayah di Kota Medan secara deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa usaha kecil bergerak di bidang kelompok industri pangan sebanyak 6 unit atau sekitar (20,0%), industri sandang dan kulit sebanyak 6 unit atau sekitar (20,0%), industri logam dan jasa sebanyak 8 unit atau sekitar (26,7%), industri kimia dan bahan bangunan sebanyak 4 unit atau sekitar (13,3%), dan kelompok aneka industri sebanyak 6 unit atau sekitar (20,0%), seperti yang dilihat pada tabel 4.9 berikut ini :

**Tabel 4.9. Distribusi Usaha Kecil Berdasarkan Bidang Usaha**

No	Jenis Industri	Jumlah (Unit)	Persentase (%)
1	Kelompok Industri Pangan	6	20,0
2	Kelompok Industri Sandang dan Kulit	6	20,0
3	Kelompok industri Logam Dan jasa	8	26,7
4	Kelompok industri Kimia dan bahan bangunan	4	13,3
5	Kelompok Industri Aneka	6	20,0
	Jumlah	<b>30</b>	<b>100</b>

Sumber : Formulir Isian Data, 2008

#### 4.6 . Hal-Hal Yang Mempengaruhi Keberhasilan Suatu Usaha Kecil

##### 1. Tenaga Kerja

Indikator yang menggambarkan adanya pengaruh positif usaha kecil terhadap pengembangan wilayah di Kota Medan yaitu faktor tenaga kerja. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa usaha kecil yang memiliki jumlah karyawan sebanyak 1 orang yaitu 1 usaha (3,3%), 2 orang yaitu 5 usaha (16,7%), 3 orang yaitu 4 usaha (13,3%), 4 orang yaitu 6 usaha (20,0%), 5 orang yaitu 3 usaha (10,0%), 6 orang yaitu 1 usaha (3,3%), 7 orang yaitu 1 usaha (3,3%), 8 orang yaitu 4 usaha (13,3%), 9 orang yaitu 3 usaha (10,0%), dan 10 orang yaitu 2 usaha (6,7%). Adapun jumlah tenaga kerja industri kecil dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut ini :

**Tabel 4.10. Distribusi Jumlah Tenaga Kerja**

No	Jumlah Tenaga Kerja	Frekuensi	Persentase
1	1 Orang	1	3,3
2	2 Orang	5	16,7
3	3 Orang	4	13,3
4	4 Orang	6	20,0
5	5 Orang	3	10,0
6	6 Orang	1	3,3
7	7 Orang	1	3,3
8	8 Orang	4	13,3
9	9 Orang	3	10,0
10	10 Orang	2	6,7
	<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>100</b>

Sumber : Formulir Isian Data, 2008

Jadi, dapat dikatakan bahwa usaha kecil sebenarnya banyak membawa dampak yang positif terhadap pengembangan wilayah di Kota Medan. Hal itu dapat kita sesuaikan dengan kenyataannya, akibat adanya usaha kecil yang semakin marak di Kota Medan, hal ini mengakibatkan peningkatan jumlah tenaga kerja yang bekerja di perusahaan tersebut. Hal itu dapat kita lihat pada data yang diperoleh, bahwa pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 jumlah usaha kecil di kota Medan mengalami peningkatan dari 11.726 unit menjadi 11.814 unit (BPS, 2007). Seiring dengan peningkatan jumlah usaha kecil, jumlah tenaga kerja akan ikut mengalami peningkatan yang cukup baik yakni dari tahun 2006 yang berjumlah 39.733 orang meningkat di tahun 2007 menjadi 40.401 orang (BPS, 2007). Hal ini menandakan bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa peningkatan usaha kecil amat berpengaruh terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja dan mengakibatkan berkurangnya tingkat pengangguran di wilayah Kota Medan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa secara umum sumber tenaga kerja yang bekerja pada usaha kecil adalah berasal dari daerah sekitar dimana usaha kecil tersebut berdiri yaitu sebanyak 17 orang atau sekitar (56,7 %) sedangkan tenaga kerja yang berasal dari luar kota adalah sebanyak 13 orang atau sekitar (43,3 %). Adapun sumber tenaga kerja industri kecil dapat dilihat pada tabel 4.11 berikut ini :

**Tabel 4.11. Distribusi Sumber Tenaga Kerja**

No	Sumber Tenaga Kerja	Frekuensi	Persentase
1	Daerah Sekitar	17	56,7
2	Luar Kota	13	43,3
	<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>100</b>

Sumber : Formulir Isian Data, 2008

Usaha kecil pada umumnya dapat memberikan dampak yang positif pada lingkungan daerah sekitarnya, salah satunya adalah terbukanya lapangan pekerjaan bagi penduduk sekitar. Lebih banyaknya tenaga kerja yang diserap oleh usaha kecil dari daerah sekitarnya adalah untuk mengoptimalkan biaya pengeluaran dalam hal gaji karyawan, karena gaji karyawan yang berasal dari luar kota jauh lebih besar dari pada memberdayakan tenaga kerja yang ada di sekitar tempat usaha. Namun setidaknya dapat dilihat bahwa dengan banyaknya usaha kecil yang berkembang akan berpeluang untuk mengurangi jumlah pengangguran di tengah sulitnya untuk mencari kerja pada saat ini.

Dari hasil penelitian juga diperoleh bahwa keterampilan atau keahlian yang dimiliki tenaga kerja adalah sebanyak 9 orang atau sekitar (30,0%) terampil menggunakan komputer, 4 orang atau sekitar (13,3%) terampil menjahit, 5 orang atau sekitar (16,7%) terampil bahasa inggris, 3 orang atau sekitar (10,0%) terampil memasak dan 9 orang atau sekitar (30,0%) tidak memiliki keterampilan. Adapun keterampilan atau keahlian yang dimiliki tenaga kerja industri kecil dapat dilihat pada tabel 4.12 berikut ini :

**Tabel 4.12. Keterampilan Atau Keahlian Yang Dimiliki Tenaga Kerja**

No	Keterampilan Atau Keahlian	Frekuensi	Persentase
1	Komputer	9	30,0
2	Menjahit	4	13,3
3	Bahasa Inggris	5	16,7
4	Memasak	3	10,0
5	Tidak Ada	9	30,0
	<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>100</b>

Sumber : Formulir Isian Data, 2008

Keterampilan dan keahlian mutlak diperlukan oleh setiap orang sehingga ada peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Semakin tingginya keahlian dan keterampilan suatu masyarakat akan berpengaruh pada tingkat perkembangan suatu wilayah. Dengan adanya keahlian dan keterampilan akan dapat mengurangi tingkat pengangguran masyarakat. Mereka yang memiliki keahlian dan keterampilan akan lebih mudah diserap oleh bidang usaha. Seperti halnya dalam penelitian ini dimana rata-rata tenaga kerja yang direkrut adalah mereka yang memiliki keterampilan sedangkan berdasarkan wawancara dengan pemilik usaha dapat diketahui bahwa tenaga kerja yang tidak memiliki keterampilan pada umumnya di gaji dengan upah yang rendah.

Usaha kecil pada umumnya rata-rata mengeluarkan biaya untuk membayar upah tenaga kerja bervariasi berdasarkan jumlah tenaga kerja. Usaha yang mengeluarkan biaya untuk upah tenaga kerja < 1 juta/bulan adalah sebanyak 6 usaha atau sekitar (20,0%), 1-5 juta/bulan adalah sebanyak 17 usaha atau sekitar (56,7%), 6-10 juta/bulan adalah sebanyak 5 usaha atau sekitar (16,7%), dan > 10 juta adalah sebanyak 2 usaha atau sekitar (6,7%). Adapun besarnya gaji karyawan yang dikeluarkan usaha per bulan dapat dilihat pada tabel 4.13 berikut ini :

**Tabel 4.13. Gaji Karyawan Per Bulan**

No	Gaji Karyawan Per Bulan	Frekuensi	Persentase
1	< 1 Juta	6	20,0
2	1-5 Juta	17	56,7
3	6-10 Juta	5	16,7
4	> 10 Juta	2	6,7
	<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>100</b>

Sumber : Formulir Isian Data, 2008

Besarnya upah yang diperoleh tenaga kerja akan berpengaruh terhadap perkembangan suatu wilayah karena daya beli masyarakat akan semakin meningkat. Semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat, pada umumnya akan berpengaruh pada tingkat konsumsi masyarakat tersebut. Semakin banyaknya usaha kecil yang tumbuh di suatu wilayah akan berpengaruh pada perkembangan wilayah tersebut karena jumlah uang yang berputar juga semakin banyak.

Besarnya total pendapatan usaha kecil tidak terlepas dari daya beli masyarakat. Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa 5 unit usaha atau sekitar (16,7%) memperoleh total pendapatan perbulan sebesar 1-10 juta rupiah, 9 unit usaha atau sekitar (30,0%) memperoleh total pendapatan perbulan sebesar 11-20 juta rupiah, 10 unit usaha atau sekitar (33,3%) memperoleh total pendapatan perbulan sebesar 21-30 juta rupiah, 4 unit usaha atau sekitar (13,3%) memperoleh total pendapatan perbulan sebesar 31-40 juta rupiah, 2 unit usaha atau sekitar (6,7%) memperoleh total pendapatan perbulan sebesar 41-50 juta rupiah. Adapun besarnya total pendapatan unit usaha per bulan dapat dilihat pada tabel 4.14 berikut ini :

**Tabel 4.14. Total Pendapatan Per Bulan**

No	Total Pendapatan Per Bulan	Frekuensi	Persentase
1	1-10 Juta	5	16,7
2	11-20 Juta	9	30,0
3	21-30 Juta	10	33,3
4	31-40 Juta	4	13,3
5	41-50 Juta	2	6,7
	<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>100</b>

Sumber : Formulir Isian Data, 2008

Besarnya biaya yang dikeluarkan oleh unit usaha untuk kepentingan produksi seperti penyediaan bahan baku, bahan pelengkap, peralatan, telepon, air dan listrik per bulan adalah 1 unit usaha mengeluarkan biaya < Rp. 1.000.000 atau sekitar (3,3%), 3 unit usaha mengeluarkan biaya Rp. 1.000.000- Rp. 5.000.000 atau sekitar (10,0%), 15 unit usaha mengeluarkan biaya Rp. 5.000.000- Rp. 10.000.000 atau sekitar (50,0%), 11 unit



usaha mengeluarkan biaya > Rp. 10.000.000 atau sekitar (36,7%). Adapun besarnya biaya yang dikeluarkan oleh unit usaha untuk kepentingan produksi per bulan dapat dilihat pada tabel 4.15 berikut ini :

**Tabel 4.15. Biaya Yang Dikeluarkan Untuk Pembelian Per Bulan**

No	Biaya Yang Dikeluarkan Untuk Pembelian Per Bulan	Frekuensi	Persentase
1	< Rp. 1.000.000	1	3,3
2	Rp. 1.000.000- Rp. 5.000.000	3	10,0
3	Rp. 5.000.000- Rp. 10.000.000	15	50,0
4	> Rp. 10.000.000	11	36,7
	<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>100</b>

Sumber : Formulir Isian Data, 2008

Dalam kegiatan usaha, faktor modal kerja merupakan faktor yang sangat mendasar. Pada usaha yang mengandalkan pengolahan bahan baku menjadi bahan jadi modal kerja merupakan prioritas pertama yang harus disiapkan.

Modal kerja terdiri dari modal tetap untuk membeli peralatan yang bersifat tidak habis, sedangkan modal tidak tetap adalah biaya yang dikeluarkan dan sangat bergantung kepada besarnya produksi dan bersifat habis pakai, misalnya biaya untuk membeli bahan baku, pembayaran tenaga kerja, pembayaran bahan penolong dan lainnya.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa rata-rata besarnya keuntungan yang diperoleh unit usaha adalah 14 unit usaha (46,7%) memperoleh keuntungan 1-10 juta per bulan, 10 unit usaha (33,3%) memperoleh keuntungan 11-20 juta per bulan, 4 unit usaha (13,3%) memperoleh keuntungan 21-30 juta per bulan, dan 2 unit usaha (6,7%) memperoleh keuntungan 31-40 juta per bulan. Adapun besarnya keuntungan yang diperoleh unit usaha per bulan dapat dilihat pada tabel 4.16 berikut ini :

**Tabel 4.16. Keuntungan Yang Diperoleh Unit Usaha Per Bulan**

No	Keuntungan Yang Diperoleh Unit Usaha Per Bulan	Frekuensi	Persentase
1	1-10 Juta	14	46,7
2	11-20 Juta	10	33,3
3	21-30 Juta	4	13,3
4	31-40 Juta	2	6,7
	<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>100</b>

Sumber : Formulir Isian Data, 2008

## 2. Sumber Modal.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa masing-masing kelompok industri kecil mendapat pinjaman dari lembaga keuangan formal, akan tetapi masih ada juga yang menggunakan modal sendiri ataupun bekerjasama dengan grosir. Sebanyak 20 unit usaha atau sekitar (66,7%) memperoleh sumber modal mutlak dari bank sedangkan sisanya 10 unit usaha atau sekitar (33,3%) memperoleh sumber modal dari modal sendiri ditambah modal dari bank ataupun bekerjasama dengan grosir. Adapun sumber modal yang diperoleh unit usaha dapat dilihat pada tabel 4.17 berikut ini :

**Tabel 4.17. Sumber Modal**

No	Sumber Modal	Frekuensi	Persentase
1	Bank	20	66,7
2	Modal Sendiri	10	33,3
	<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>100</b>

Sumber : Formulir Isian Data, 2008

Beberapa hal yang menyebabkan responden tidak memanfaatkan fasilitas kredit dari lembaga keuangan formal adalah tingkat bunga yang terlalu tinggi, responden tidak mempunyai agunan dan memerlukan prosedur administrasi yang tidak dapat dipenuhi responden.

Bagi responden yang bermitra dengan grosir membuat perjanjian kerja antara lain grosir menyediakan bahan baku, dan hasil olahan dari pengrajin dipasarkan dan dijual kembali ke grosir.

Unit usaha yang memanfaatkan kredit dari bank memperoleh bantuan modal yang bervariasi. Sebanyak 3 unit usaha atau sekitar (10,0%) memperoleh modal 1-10 juta rupiah,

4 unit usaha atau sekitar (13,3%) memperoleh modal 11-20 juta rupiah, 9 unit usaha atau sekitar (30,0%) memperoleh modal 21-30 juta rupiah, 4 unit usaha atau sekitar (13,3%) memperoleh modal 31-40 juta rupiah, 2 unit usaha atau sekitar (6,7%) memperoleh modal 41-50 juta rupiah, 2 unit usaha atau sekitar (6,7%) memperoleh modal 61-70 juta rupiah, 1 unit usaha atau sekitar (3,3%) memperoleh modal 71-80 juta rupiah, 2

unit usaha atau sekitar (6,7%) memperoleh modal 81-90 juta rupiah, 1 unit usaha atau sekitar (3,3%) memperoleh modal 91-100 juta rupiah, dan 2 unit usaha atau sekitar (6,7%) memperoleh modal > 100 juta rupiah. Adapun jumlah modal yang diterima unit usaha dapat dilihat pada tabel 4.18 berikut ini :

**Tabel 4.18. Jumlah Modal Yang Diterima**

No	Jumlah Modal Yang Diterima	Frekuensi	Persentase
1	1-10 juta	3	10,0
2	11-20 Juta	4	13,3
3	21-30 Juta	9	30,0
4	31-40 Juta	4	13,3
5	41-50 Juta	2	6,7
6	61-70 Juta	2	6,7
7	71-80 Juta	1	3,3
8	81-90 Juta	2	6,7
9	91-100 Juta	1	3,3
10	> 100 Juta	2	6,7
	<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>100</b>

Sumber : Formulir Isian Data, 2008

### 3. Sifat Produksi

Produk industri kecil di Kota Medan pada umumnya adalah bahan jadi yang dapat dikonsumsi langsung oleh konsumen. Jenis produk yang dihasilkan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 19 berikut ini :

**Tabel 4.19. Jenis Produk Yang Dihasilkan**

No	Jenis Produk Yang Dihasilkan	Frekuensi	Persentase
1	Pakaian	1	3,3
2	Hasil Foto Copi	2	6,7
3	Kerupuk	1	3,3
4	Roti dan Kue	2	6,7
5	Minuman	3	10,0
6	Tas	2	6,7
7	Sandal dan Sepatu	3	10,0
8	Emas	6	20,0
9	Jasa	6	20,0
10	Bahan Bangunan	2	6,7
11	Kursi, Lemari, Tempat Tidur	2	6,7
	<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>100</b>

Sumber : Formulir Isian Data, 2008

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diketahui bahwa jenis produk yang paling banyak dihasilkan adalah emas dan jasa masing-masing 6 unit usaha atau sekitar (20,0%) sedangkan produk yang paling sedikit dihasilkan adalah pakaian dan kerupuk masing-masing 1 unit usaha atau sekitar (3,3%).

### 4. Sumber Bahan Baku

Pada umumnya industri kecil di kota Medan mengolah bahan baku menjadi bahan jadi atau setengah jadi. Sumber bahan baku industri kecil adalah dari wilayah Kota Medan (lokal), luar Kota Medan (luar daerah), dan import. Sumber-sumber bahan baku industri di kota Medan dapat dilihat pada tabel 20 berikut ini :

**Tabel 4.20. Sumber Bahan Baku**

No	Sumber Bahan Baku	Frekuensi	Persentase
1	Lokal	18	60,0
2	Luar Daerah	9	30,0
3	Import	3	10,0
	<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>100</b>

Sumber : Formulir Isian Data, 2008

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar sumber bahan baku untuk produksi berasal dari lokal yaitu 18 unit usaha atau sekitar (60,0%), 9 unit usaha atau sekitar (30,0%) berasal dari luar daerah dan 3 unit usaha atau sekitar (10,0%) berasal dari import. Bahan baku yang di datangkan dari luar

daerah pada umumnya dari Deliserdang dan Tanah Karo, sedangkan bahan baku import sudah disediakan oleh importir. Bahan baku import pada umumnya adalah bahan kimia, bahan pakaian dan meubel.

### 5. Pemasaran

Pemasaran hasil industri kecil untuk memenuhi permintaan lokal, luar daerah dan ekspor. Pemasaran ke luar negeri (ekspor) adalah berupa baju muslim, baju tidur. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa sebagian besar hasil produksi industri kecil dipasarkan pada pasar lokal yaitu 23 produk atau sekitar (76,7%), 5 produk atau sekitar (16,7%) dipasarkan ke luar daerah dan 2 produk atau sekitar (6,7%) dipasarkan ke pasar ekspor. Pemasaran produk industri kecil di kota Medan dapat dilihat pada tabel 21 berikut ini :

**Tabel 4.21. Pemasaran Produk**

No	Pemasaran Produk	Frekuensi	Persentase
1	Lokal	23	76,7
2	Luar Daerah	5	16,7
3	Eksport	2	6,7
	<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>100</b>

Sumber : Formulir Isian Data, 2008

Sistem pemasaran yang dilakukan oleh usaha kecil menengah belum ada yang menggunakan media iklan, pada umumnya masih menggunakan metode pemasaran konvensional yaitu dari mulut ke mulut.

Dampak positif dan tingkat kemajuan yang dialami oleh daerah yang memiliki usaha kecil terbanyak akan terlihat lebih pesat dan lebih maju baik dalam hal teknologi ataupun dari tingkat pendapatan rata-rata penduduknya per bulan. Hal itu dapat dilihat berdasarkan data BPS dimana jumlah industri kecil terbanyak itu terdapat pada Kecamatan Medan Kota. Perkembangan Kecamatan Medan Kota sudah sangat pesat, jalan raya yang mulus, ditemukan banyak pusat jajanan makanan dan pertokoan, serta tingkat disiplin dan keamanan lebih terjamin. Hal itu dikarenakan kebanyakan masyarakatnya sudah memiliki pekerjaan tetap, memiliki penghasilan tetap, tingkat pengangguran yang sedikit, memiliki ketrampilan dan pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang jumlah industrinya masih relatif sedikit.

Jika dibandingkan dengan daerah yang paling sedikit jumlah usaha kecilnya yaitu di daerah Kecamatan Medan Amplas, dapat dilihat bahwa Kecamatan Medan Kota mengalami kemajuan yang lebih pesat. Hal itu dapat dilihat bahwa di daerah Kecamatan Medan Amplas tingkat kriminalitas masih tinggi, masih ada yang jarang dilalui oleh jalur kendaraan umum, pusat pertokoan masih lebih sedikit dibandingkan dengan Kecamatan Medan Kota

### 5. Kesimpulan

Dari uraian hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain :

1. Hasil penelitian terhadap usaha kecil memperlihatkan adanya pengaruh kredit perbankan terhadap pendapatan usaha kecil. Semakin tingginya modal kredit yang diberikan perbankan maka tingkat pendapatan usaha kecil makin meningkat karena semakin banyak jumlah modal maka modal untuk membeli bahan baku, dan peralatan otomatis meningkat
2. Adanya pengaruh tenaga kerja terhadap peningkatan pendapatan suatu usaha kecil dapat dilihat dari hasil penelitian, dimana semakin banyak jumlah tenaga kerja maka usaha kecil tersebut dapat menghasilkan suatu produk lebih besar dari segi kuantitas sehingga tercipta efisiensi waktu dan tenaga. Jumlah tenaga kerja yang memadai juga dapat terciptanya suatu manajemen kerja yang baik dimana tenaga kerja dapat dibagi berdasarkan keahlian dari masing-masing karyawan.
3. Dari penelitian yang dilakukan juga diketahui bahwa usaha kecil berdampak positif terhadap pengembangan wilayah di kota Medan, hal ini dapat juga dilihat dari data BPS tahun 2006 sampai dengan 2007 dimana jumlah industri kecil mengalami peningkatan dari 11.726 menjadi 11.814, hal itu juga seiring dengan peningkatan jumlah tenaga kerja dari 39.733 menjadi 40.401 dan sudah pasti bahwa hal ini akan berpengaruh pada peningkatan pendapatan suatu daerah.

## 6.Saran

Dari kesimpulan diatas dapat dibuat saran dalam rangka pembangunan wilayah umumnya dan pengembangan industri kecil khususnya yakni :

1. Untuk meningkatkan pengembangan industri kecil di wilayah Medan, disarankan perlu perhatian pihak pengambil keputusan dan instansi terkait dalam hal penyediaan dana dan bantuan permodalan atau kredit dengan syarat tingkat bunga yang relatif rendah.
2. Karena banyaknya jenis usaha industri kecil, maka untuk pengembangannya perlu dilakukan pola pengembangan selektif yaitu berdasarkan keunggulan suatu wilayah tertentu, atau menurut lokasi yang cocok untuk mendirikan suatu usaha tertentu, dan juga untuk lebih membenahi sarana dan prasarana yang mendukung tercapainya tujuan suatu usaha industri kecil tersebut.

Oleh karena industri kecil di wilayah Kota Medan mempunyai pengaruh yang cukup berarti terhadap peningkatan dan penyerapan tenaga kerja baik jangka pendek maupun jangka panjang, agar kiranya pengembangan sub sektor ini dimasukkan dalam program perencanaan jangka panjang pemerintahan Kota Medan

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Kuncoro and Abimanyu, *Struktur dan Kinerja Industri Indonesia dalam Era Deregulasi dan De-birokratisasi*. Kelola (Gadjah Mada University Business Review), 1995.
- [2] T. W. W. Utomo, "Analisis Masalah Dan Implementasi Kebijakan Perkoperasian Dan Usaha Kecil Menurut Pendekatan 'Institutional Arrangements,'" *J. Wacana Kinerja Kaji. Prakt. Kinerja dan Adm. Pelayanan Publik*, vol. 3, no. 1, pp. 29–30, 2020.
- [3] A.Sidik Prawira Negara, *Kebijakan Pembinaan Pengusaha Kecil Khususnya Tentang Organisasi Usaha di Indonesia*. Jakarta: JIIS, 1994.
- [4] Bank Indonesia, *Kebijakan dan Upaya Perbankan dalam Membantu Pengembangan Usaha Kecil dan Koperasi*. Jakarta: Bank Indonesia, 1997.
- [5] D. Retnadi, *PERILAKU PENYALURAN KREDIT BANK*. Jakarta: Jakarta Elex Media Komputindo, 2006.
- [6] Sri Lestari Rahayu, *Analisis Peranan Perusaha Modal Ventura dalam Mengembangkan UKM di Indonesia, Kajian Ekonomi dan Keuangan, Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan dan Kerjasama Internasional*. 2005.
- [7] P. Tjiptoherijanto, *Prospek Perekonomian Indonesia dalam Rangka Globalisasi*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- [8] Maryatmo and Susilo, *Dari Masalah Usaha Kecil sampai Masalah Ekonomi Makro*. Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atmajaya, 1996.
- [9] S. Sukirno, *Pengantar Teori Ekonomi Makro*. Jakarta: Raja Grafindo, 1994.
- [10] Kadariah, *Ekonomi Perencanaan*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI, 1985.
- [11] M. P. & S. C. S. Todaro, *Economic Development*, Eight Edit. England: Pearson Education Limited, 2003.
- [12] T. Hanafiah, *Pendekatan Wilayah dan Pembangunan Perdesaan*. Bogor: Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor, 1982.
- [13] W. Jumiadi, *Analisis Pengaruh Perkembangan Industri Kecil Pakaian Jadi terhadap Pengembangan Wilayah Kota Medan*. Medan: USU, 2004.